

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI

Enika Timila, S.AP<sup>1</sup>, Efendi, S.Sos., M.Si<sup>2</sup>, Nurfitri, S.Pd., M.Pd<sup>3</sup>,  
STIA-NUSA SUNGAI PENUH

Email:

[Enikatimila@gmail.com](mailto:Enikatimila@gmail.com)  
[Efendidahlan1977@gmail.com](mailto:Efendidahlan1977@gmail.com)  
[Fitrinur8833@gmail.com](mailto:Fitrinur8833@gmail.com)

### ABSTRACT

*Enika Trimila NPM. 1410078201050. Implementation of the Non Food cash aid Program in Siulak Mukai Sub-District, Kerinci Regency.*

*This research took place in Siulak Mukai Sub-District with the formulation of the problem: How is the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Siulak Mukai District, Kerinci Regency? The aim of this research is to know and explain about the implementation of the Non Food Cash Aid Program in Siulak Mukai District, Kerinci Regency. The research method is a qualitative with. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The number of informants in this study was 19 people. The data analysis technique is data triangulation. Based on the results of research, namely the assistance provided by the government has been implemented in a structure, on target, on time and reduces the burden on the poor in terms of expenditure and can help the food security of the poor.*

**Keywords:** *Implementation, Non Food Cash Aid Program*

### I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September tahun 2017 penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,58 juta jiwa dan september pada tahun 2019 berjumlah 24,79 juta jiwa Penduduk Miskin di Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”.

Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negara (Himbara).

Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Para penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet/dompet* elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERPRESRI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai : bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Berdasarkan dengan peraturan tersebut diatas maka Presiden Republik Indonesia berharap penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (2017), menjelaskan bahwa pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive sampling*, dengan menyertakan informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti yaitu Koordinator Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kerinci.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Siulak Mukai adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (dalam sugiono, 2013:337) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tepat Sasaran

Dari uraian dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Siulak Mukai mengenai tepat sasaran dapat diinterpretasikan antara teori yang menjadi dasar dengan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Dinas Sosial Kabupaten Kerinci dalam menjalankan Program BPNT dari Pemerintah Pusat di Kecamatan Siulak Mukai sudah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur.

Jika pelaksanaan penyaluran bantuan ini mengikuti buku pedoman sesuai dengan petunjuk teknis maka Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini akan berjalan dengan efektif.

## **2. Tepat Waktu**

Dari jawaban indikator penelitian yang kedua tentang ketepatan waktu dapat disimpulkan bahwa secara teori Dinas Sosial telah menerapkannya dengan tujuan agar penyaluran program BPNT dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan supaya tidak terjadi keterlambatan penyaluran bantuan. Namun program ini masih terdapat sedikit kendala seperti yang telah dijelaskan oleh informan dalam wawancara yang telah dilaksanakan mengenai masalah pada mesin EDC yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman saldo ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Pemerintah Pusat dan kurangnya informasi dari pihak penyelenggara kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Sedangkan menurut Buku Pedoman BPNT pembagian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Sosial dan berkoordinasi dengan bank penyalur.

Jika hal ini dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman dan Pemerintah Pusat serta pihak penyelenggara saling berkoordinasi dengan baik maka masyarakat yang menerima program bantuan tersebut tidak lagi mengeluh atas terjadinya keterlambatan penerimaan bantuan dan program bantuan tersebut dapat berjalan dengan lancar serta tepat waktu.

## **3. Tingkat Pendapatan**

Dari uraian dan hasil wawancara di atas dengan informan serta pengamatan langsung peneliti di lapangan tentang tingkat pendapatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya Program BPNT tingkat pendapatan juga sangat berpengaruh antara penghasilan dan pengeluaran terhadap masyarakat miskin seperti yang telah dijelaskan oleh informan dalam wawancara yang telah dilaksanakan peneliti terkait dengan pendapatan hal ini mengacu pada buku pedoman BPNT yaitu untuk mengatasi dalam biaya pendidikan anak-anak serta dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Maka Dengan adanya Proram BPNT ini yang disalurkan kepada masyarakat miskin yang tingkat pendapatannya sangat rendah. dengan adanya Program BPNT ini mampu memberikan pertolongan dan membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas pendapatan.

## **4. Ketahanan Pangan**

Dari jawaban beberapa informan dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah menerapkannya secara teori namun Program BPNT ini belum begitu mampu membawa kesejahteraan secara maksimal terhadap kehidupan masyarakat yang kurang mampu seperti yang telah dijelaskan oleh informan dalam wawancara yang telah

dilaksanakan peneliti. hanya saja kebutuhan pangan keluarga mereka tetap stabil yang hanya mampu bertahan sampai dengan 10-14 hari, karena jumlah beras yang di terima oleh KPM sebanyak 8kg-10kg dan telursebanyak 10-20 butir per bulan. meski demikian Program BPNT sangat membantu menjaga kestabilan dan kecukupan gizi.

Hal ini telah sesuai dengan petunjuk buku pedoman BPNT yaitu Ketahanan Pangan adalah dapat memberikan stabilitas gizi kepada masyarakat. Maka dengan menerima bantuan Program BPNT ini anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini tetap terpenuhi kecukupan gizinya, bernutrisi serta dapat mengenal hidup sehat.

#### IV. SIMPULAN

1. Ketepatan sasaran mengenai penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini didasari bahwa yang menjadi prioritas penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, berpenghasilan rendah, yang mempunyai tanggungan anak dan lansia, serta wanita-wanita yang memiliki status janda.
2. Ketepatan waktu penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni sistem jaringan yang mengakibatkan saldo terlambat masuk ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
3. Tingkat Pendapatan sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, meskipun ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya berubah, akan tetapi dengan adanya bantuan ini dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu.
4. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini Ketahanan Pangan masyarakat sudah sangat terbantu , walaupun tidak seluruhnya terpenuhi, tetapi bisa membantu mencukupi pangan masyarakat dalam kehidupan sehari- hari. Karena jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 110.000/bulan tetapi tidak bisa di uangkan melainkan ditukarkan dengan bahan pangan seperti beras dan telur dengan memenuhi kualitas standar. dan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat kurang mampu dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif dan sesuai prosedur.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) Sungai Penuh.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, saran, arahan, bimbingan serta dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Murlinus, S.H,M.H selaku Ketua STIA-NUSA Sungai Penuh
2. Bapak Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos, M.A.P selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Efendi, S.Sos, M.Si dan Ibu Nurfitri, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Masyarakat Kecamatan Siulak Mukai yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.
5. Bapak Ibu Dosen STIA-NUSA Sungai Penuh yang telah mendidik serta membagi ilmunya dengan penulis sehingga ketahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, Ayah dan ibu yang tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang, berupa dorongan, perhatian, bimbingan, arahan serta do'a yang tulus dan ikhlas. Serta Suami ku yang tersayang dan anak ku yang tercinta.
7. Kepada sahabat dan teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori,dan Terapan*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Hartomo, H. dan Aziz A. 2004. *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Hadari, Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah mada Press.
- Iskandar,2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press: Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta
- Narbuko, Cholid. Dkk.2003. *metodologi Penelitian*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Setiawan, G. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Soekanto,S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soelaeman, M. 1998. *Ilmu Sosial dasar*. Refika Aditama: Bandung
- Sugiyono,2013. *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama: Bandung.
- Syaukani, H.R. dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Usman,Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- STIA\_NUSA, 2018, Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian, Skripsi dan Buku Konsultasi 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti, Sungai Penuh.*
- Peraturan-Peraturan.**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Sumber lainnya**
- Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019.
- Buku Kajian Program Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017